



KEJAHATAN JALANAN MEMPRIHATINKAN

Evaluasi Atas Kegagalan Pemerintah Lindungi Remaja

YOGYA (KR) - Bagaimana mungkin kota yang viral dengan sebutan 'terbuat dari rindu, pulang dan angkringan' secara berkala digemparkan oleh berita kejahatan jalanan yang pelaku dan korban-nya adalah anak remaja. Seakan aparat hukum dan pemerintah daerah tidak mampu mengatasi persoalan yang berulang ini.

Penulis sebagai bagian dari lembaga legislasi Kota Yogya mengakui adanya kegagalan di semua sektor dalam menangani kasus ini. Kejahatan jalanan oleh anak usia remaja masih dilihat sebagai problem domestik keluarga dan lingkungan, sehingga solusi yang ditawarkan sekadar imbauan dan pembinaan keluarga. Sedangkan ketegasan menerapkan hukum dan kemarahan publik terhadap pelaku kejahatan jalanan anak usia remaja justru bisa lebih berbahaya menjadi pengadilan jalanan.

Banyak aspek yang melatarbelakangi. Mulai pembiaran anak di bawah umur kendarai sepeda motor, penggunaan gadget tak terkontrol, tidak ada pembatasan akses internet layak anak hingga belum adanya tata kota ramah anak. Pergaulan bebas berbasis media sosial didukung mobilitas tinggi ditambah mudahnya pil koplo

Krisnadi Setyawan
Fraksi Partai Gerindra



KR-Istimewa

merubah kelompok bermain menjadi organisasi ala gengster bahkan mafia yang beradu eksistensi dengan perkelahian jalanan.

Kegagalan kedua adalah kelompok geng anak ini tidak berakhir ketika jenjang pendidikan selesai yang seharusnya beralih ke lapangan kerja profesional. Kegagalan ketiga adalah pemerintah tidak

mampu memfasilitasi masyarakat berpendapatan rendah karena upah minimum daerah yang tidak layak untuk tetap bisa mengaktualisasikan dirinya secara manusiawi.

Berangkat dari sudut pandang ini maka anak usia remaja baik korban maupun pelaku kejahatan jalanan adalah korban dari kegagalan pemerintah daerah dalam menjamin ketahanan keluarga. Pada lingkup Kota Yogya sudah ada Perda 8/2020 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga. Ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan guna hidup mandiri. Untuk mencapai hal tersebut maka pemerintah daerah dapat melaksanakan berbagai kegiatan fasilitasi pemenuhan ketahanan fisik, ekonomi, sosial, dan budaya untuk setiap keluarga.

Pada akhirnya, kita harus berhitung apakah Daerah Istimewa Yogyakarta mampu menyelamatkan generasi mudanya Apakah pengambil kebijakan disemua tingkatan mampu melakukan terobosan radikal mengurangi kemiskinan dan membuka ruang bagi tumbuhnya kepedulian orang tua untuk membersamai anak-anaknya. Mari kita mulai. **(Dhi)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

